

**FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN
PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DI
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh:

FAHRIZA HAVIS
2003100019

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : **FAHRIZA HAVIS**
N.P.M : 2003100019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Medan, 22 Mei 2024



Dosen Pembimbing


AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP
NIDN. 0120018303

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801

Dekan,



Dr. ARIFINSALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **FAHRIZA HAVIS**
N P M : 2003100019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM** (.....)
PENGUJI II : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.** (.....)
PENGUJI III : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN



Dengan ini saya, **Fahriza Havis**, NPM 2003100019 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah dari orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 Mei 2024

yang menyatakan

Fahriza Havis
2003100019



ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG

Fahriza Havis
2003100019

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah daerah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan di lingkungan dan yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari. Permasalahan ini sangat penting dan perlu menarik perhatian pemerintah daerah yang harus diselesaikan karena permasalahan sampah cukup serius (Sofianto, 2024). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang bertugas mengelola sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan Kesehatan masyarakat. Untuk melakukan ini, mereka telah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berfungsi untuk mengelola sampah tersebut. Namun, pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukannya Pengawasan Represif supaya hasilnya berjalan secara optimal dan sesuai yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan fungsinya tetapi masih belum efektif, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan serta jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih kurang, sehingga menjadi faktor penghambat mengoptimalkan pencegahan pencemaran sampah.

Kata Kunci: Pengawasan Represif, Lingkungan Hidup, Pencegahan Limbah, Pencemaran

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta tidak lupa shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju jalan yang terang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian **“Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya Di Kabupaten Deli Serdang”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, nasehat, dukungan serta bantuan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Teristimewa kedua orang tua penulis, Ayah penulis Rudi Irawan dan Ibu penulis Yenni yang dalam tiap sujudnya menguntai doa yang tiada henti, selalu mengingatkan, dan sebagai motivator serta dukungan baik moril maupun materil seumur hidup penulis, terkhusus ketika

menyelesaikan skripsi ini. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan penulis untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian berikan selama ini.

Dan tidak lupa pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Ardhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, MSi selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dosen pembimbing penulis Bapak Agung Saputra, S.Sos, M.AP yang telah berperan besar dalam memberikan banyak arahan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik penulis sampai sekarang ini.

8. Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu surat menyurat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Nona pemilik NIM 0701201063 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini. Tetap kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa serta memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki oleh manusia lain.
11. Teman-teman seperjuangan Stambuk 2020 Ilmu Administrasi Publik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan support serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang bersifat

membangun dan guna melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 22 Mei 2024

Hormat saya,

Fahriza Havis
2003100019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengawasan.....	9
2.1.1 Indikator Pengawasan.....	10
2.1.2 Tujuan Pengawasan.....	11
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan.....	13
2.1.4 Teknik Pengawasan.....	15
2.1.5 Jenis Pengawasan.....	17
2.1.6 Fungsi Pengawasan.....	20
2.2 Pengawasan Represif.....	22
2.3 Pencemaran.....	23
2.4 Limbah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Kerangka Konsep.....	29
3.3 Definisi Konsep.....	29
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	31
3.5 Informan dan Narasumber.....	32

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	39
4.1.2 Penyajian Data	39
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	40
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DOKUMENTASI	61

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	35
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	29
Gambar 3.2 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup	35
Gambar 3.3 Struktur Organisasi	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: Surat Pernyataan
Lampiran IV	: Daftar Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	: Draft Wawancara
Lampiran VI	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran VII	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VIII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	: SK-4 Undangan Panggilan Seminar Proposal
Lampiran X	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran XI	: Surat Keterangan Balasan atau Selesai Riset
Lampiran XII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XIII	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XIV	: Surat LoA KESKAP
Lampiran XV	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan. Timbulan sampah tidak akan berkurang atau habis bahkan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia serta semakin tinggi dan kompleksnya kegiatan manusia. Timbulan sampah yang semakin besar dari hari ke hari akan mengurangi ruang dan mengganggu aktivitas manusia sehingga tujuan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup justru membuat kualitas hidupnya menurun karena permasalahan timbulan sampah (Yuliesti et al., 2020).

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah daerah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan di lingkungan atau sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari. Permasalahan ini sangat penting dan perlu menarik perhatian pemerintah daerah yang harus diselesaikan karena permasalahan sampah cukup serius (Sofianto, 2024).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya (Riswan et al., 2015).

Kabupaten Deli Serdang adalah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km². Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah Timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Deli Serdang 2023, penduduk kabupaten ini berjumlah 2.155.625 jiwa, dan merupakan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Dari data situs deliserdangkab.go.id mengatakan bahwa, volume yang didata di Kabupaten Deli Serdang menghasilkan timbunan sampah sekitar 1.078 Ton/hari dengan jumlah penduduk 2.155.625 jiwa. jika dihitung 32.34 Ton/Bulan dan jika dijumlahkan sekitar 388.08 Ton/Tahun banyaknya volume sampah. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah sangat penting untuk dilakukan sehingga tidak menjadi beban. Terutama bagi pemerintah dan masyarakat, sampah seharusnya tidak menjadi beban tetapi harus menjadi keuntungan dalam hal ekonomi dan kebersihan lingkungan.

Mengenai pengaturan tentang pengelolaan persampahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli

Serdang serta bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan seperti yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kabupaten Deli Serdang khususnya, permasalahan sampah merupakan salah satu prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, mengingat Deli Serdang sangat potensial dikarenakan jumlah penduduknya yang cukup tinggi dan mengingat daerah ini yang cukup luas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang membuat perencanaan dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mengatur dan mengawasi pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga dan tempat umum, membangun dan mengoperasikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar lingkungan, mendorong pengurangan, daur ulang, dan pengolahan sampah menjadi bahan yang berguna, dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang bertugas mengelola sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk melakukan ini, mereka telah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengumpulkan dan mengangkut sampah, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengelolaan sampah.

Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang baik. Adapun bentuk pengelolaan yang dilakukan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Deli Serdang yaitu mengadakan pemilahan sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik) oleh masing-masing rumah tangga, Pola Pewadahan, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan, dan Setelah sampah dikumpulkan dan diangkut, maka selanjutnya sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir yang tersedia.

Oleh karena itu sampah sekarang menjadi masalah besar bagi lingkungan masyarakat, pengelolaan sampah ini harus dilakukan secara menyeluruh dari akar hingga ujung. Untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat, ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah harus diterapkan. Namun, sampah juga memiliki efek yang baik dan buruk. Sampah dapat bermanfaat jika digunakan sebagai pupuk, tetapi sampah akan buruk bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan bahkan mempengaruhi masyarakat.

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaannya. Maksudnya ialah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana (Nursan & Kahar, 2019). Oleh karena itu pentingnya pengawasan ini diadakan untuk menjaga kinerja dalam mengatasi permasalahan sampah.

Pengawasan Represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan sedang berjalan atau setelah kegiatan selesai. Untuk itu pengawasan ini dilakukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana (Sari et al., 2022). Pengawasan Represif juga bisa menstabilkan program pemerintah terkait masalah sampah dengan seterusnya diawasi agar hasilnya sesuai yang diharapkan pemerintah.

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial (Al Adawiah, 2015). Pencegahan juga harus ditingkatkan dalam permasalahan sampah ini dikarenakan dengan adanya pencegahan, setidaknya bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi biaya pengelolaan sampah

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Rahadian, 2016). Pembangunan juga sangat diharapkan seluruh kalangan masyarakat yaitu dengan membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di setiap daerah agar masalah sampah bisa secepatnya teratasi.

Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Oleh karena itu diperlukannya Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam programnya yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang merupakan cara mereka mengatasi dan mengelola sampah yang cukup banyak di Kabupaten Deli Serdang. Digunakannya Pengawasan Represif

ialah untuk memastikan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya Di Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis kepada kajian Ilmu Administrasi Publik, pada kajian mata kuliah manajemen publik.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

a) Bagi Mahasiswa

- 1) Dapat memperdalam pengetahuan tentang Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya.
- 2) Dapat menerapkan teori yang didapat dari perkuliahan dengan kegiatan penelitian di lapangan.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Pengawasan, Indikator Pengawasan, Tujuan Pengawasan, Prinsip-Prinsip Pengawasan, Teknik Pengawasan, Jenis Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Pengawasan Represif, Pencemaran, dan Limbah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan dan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah data penelitian yang diperoleh dari lapangan yang di analisis sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil pembahasan yang diberikan atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Memuat Simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengawasan

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling* berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap tindak pemerintah/aparat administrasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku (Desiana, 2013).

Menurut The Liang Gie (2000:64) Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocok-kan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki (Meriza, 2018).

Peran Pengawasan meyakinkan bahwa semua berjalan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Pengawasan juga memberikan *feedback* mengenai apakah perencanaan untuk periode mendatang dapat dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya (Umar, 2015).

Konsep Pengawasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen, dengan pihak yang lebih atas memeriksa atau mengontrol pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan dianggap sebagai tahap terakhir dari fungsi manajemen. Dari perspektif manajemen, pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin bahwa seluruh pekerjaan

dilakukan sesuai dengan rencana dan peraturan atau upaya agar pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan, hambatan dapat dikurangi dan hambatan yang telah terjadi dapat segera diperbaiki.

Oleh karena itu pengawasan dapat disimpulkan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan semua kegiatan organisasi dapat terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus untuk mengoreksi dan memperbaiki apabila ditemukan penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Proses pengawasan terdiri dari dua tahap, yaitu menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan, dan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan (Hazrullah, 2021).

2.1.1 Indikator Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko berikut ini telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan:

Menurut T. Hani Handoko ada beberapa indikator dalam proses pengawasan, yaitu:

1. Tahap penetapan standar.
2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan (Handoko, 2012).

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) terdiri dari empat indikator yaitu:

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan instansi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target instansi.
2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi (Zai et al., 2022).

2.1.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan

rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang (Marniati, Prof. Adjunct, 2020).

Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin. Melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi (Sigar et al., 2018).

Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan (Maiti & Bidinger, 2017).

Menurut Artamevia tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah pekerjaan berjalan lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh karyawan dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui penggunaan *budget* yang telah ditetapkan apakah sesuai dengan rencana awal atau tidak.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan *procedure* dan program (fase/tingkat pelaksanaan).
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (ARTAMEVIAH, 2022).

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Prinsip pengawasan bertujuan untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, dengan adanya pemberian instruksi-instruksi dan wewenang kepada bawahan. Prinsip pengawasan sangatlah penting, karena merupakan standar atau alat pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut dapat menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak (Leonade, 2019).

Prinsip-prinsip pengawasan menurut Syafwandi yaitu :

1. Objektif dan menghasilkan fakta Pengawasan harus bersifat objektif dan menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhi.
2. Pengawasan berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal tolak keputusan pimpinan.
3. Preventif Pengawasan harus bersifat mencegah sedini mungkin terjadinya kesalahan, berkembang dan terulang kesalahan, sehingga pengawasan harus sudah dilakukan pada tahap perencanaan.

4. Pengawasan bukan tujuan Pengawasan tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
5. Efisiensi Pengawasan harus dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan (Syafwandi & Umar, 2022).

Menurut Wahyu Baskoro prinsip - prinsip dalam pengawasan antara lain :

1. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
6. Pengawasan harus luwes (*fleksibel*).
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan (*control by exception*).
9. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (*corrective action*) (Wahyu Baskoro, 2018).

2.1.4 Teknik Pengawasan

Adapun teknik pengawasan Menurut Billah antara lain yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.

Pengawasan dapat berbentuk seperti:

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

b. Observasi ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti:

a. Laporan tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran (Billah, 2019).

Menurut Nuru Teknik pengawasan ada dua macam yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari:

a. Laporan tertulis

b. Laporan lisan (Nuru et al., 2013).

Teknik yang dapat digunakan dalam metode pengawasan yaitu dapat berupa :

1. Pengawasan langsung secara pribadi (*personal observation*), Pengawasan ini merupakan pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan/bawahan yang sedang bekerja. Apabila terjadi penyimpangan maka pimpinan dapat segera melakukan koreksi dengan cara menegur atau memberikan petunjuk, sehingga pada saat itu juga kegiatan tersebut dapat segera diperbaiki. Teknik yang kedua adalah
2. Menggunakan laporan (*report*), Laporan dibuat oleh para manajer bawahan, misalnya manajer produksi menyusun laporan produksi, manajer pemasaran

membuat laporan-laporan pemasaran. Berdasarkan laporan-laporan ini dapat diketahui dan diawasi perkembangannya dan kegiatan-kegiatan yang lampau.

3. Penilaian kegiatan (*performance evaluation*), Penilaian kegiatan dilakukan guna mengukur suatu kegiatan dalam segi kualitas atau status apakah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak (Ii & Pustaka, 2002).

2.1.5 Jenis Pengawasan

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.
2. Pengawasan Preventif dan Represif Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya.

3. Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (Aedi, 2005).

Menurut Hasriana Ada tiga jenis pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan *concurrent*, dan pengawasan umpan balik, berikut penjelasannya:

1. Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*), Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*), Pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”, dilakukan selama kegiatan berlangsung.
3. Pengawasan Umpan Balik (*feedback control*), Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang (Hasriana, 2019).

Jenis-jenis Pengawasan Menurut Edi adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan internal dan eksternal
 - a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.

- b. Pengawasan eksternal pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut.
2. Pengawasan Preventif dan Refresif
 - a. Pengawasan Preventif: sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - b. Pengawasan Refresif: setelah kegiatan dilaksanakan.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
 - a. Pengawasan aktif (dekat) Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.
 - b. Pengawasan Pasif Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran
 - a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadarluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.
 - b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin (Edy Susanto, 2019).

2.1.6 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah sebagai pengendalian, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan,

diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan organisasi yang dihadapi. Adapun kegiatannya dengan mengevaluasi dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target organisasi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai disediakan informasi pada standar kinerja yang relevan, untuk memperbaiki perilaku menyimpang dan untuk merangsang kinerja yang efektif (Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh, 2019).

Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah suatu pekerjaan dapat dijalankan secara efektif (Tri Sakti et, al 2018).

Menurut Maiti mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan

mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat tujuan organisasi.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan, adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan (Maiti & Bidinger, 2017).

2.2 Pengawasan Represif

Pengawasan represif jika merunut pada elemen dalam teori yang dikemukakan oleh Griffin biasa dilakukan sebelum atau setelah ada pengaduan dari penerima layanan. Bila dilakukan sebelum ada aduan, tindakan represif biasanya didasari oleh keinginan anggota DPRD untuk melakukan pengukuran kinerja atau membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan (Anam & Anwar, 2020).

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaannya. Maksudnya ialah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana (Nursan & Kahar, 2019).

Pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan sedang berjalan atau setelah kegiatan selesai. Untuk itu pengawasan ini dilakukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana (Sari et al., 2022).

Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggihkan berlakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggihkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, atau dengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.

2.3 Pencemaran

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, komponen lain kedalam lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas alam menurun dan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Siregar & Nasution, 2020).

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan manusia. Pencemaran yang di akibatkan oleh faktor kegiatannya sendiriseperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, dan lain-lain (Mardianti et al., 2020)

Pencemaran lingkungan adalah sebagai perubahan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, jumlah organisme, Tingkat radiasi dan pola penggunaan energi sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya (Li & Lingkungan, 2014).

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua makhluk hidup di bumi, seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didirikannya industri-industri untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang akan menimbulkan jumlah dan macam limbah industri yang dibuang ke lingkungan (Sompotan & Sinaga, 2022).

Jenis-jenis Pencemaran Menurut Mardianti yaitu :

1. Pencemaran air

Limbah industri, sisa insektisida, dan sampah domestik adalah beberapa jenis pencemar yang dapat menyebabkan polusi air. Sampah industri seperti Pb (timbal), Hg (raksa), Zn (zink), dan CO dapat terkumpul dan menjadi racun. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri mengurangi jumlah oksigen di air, mengganggu aktivitas kehidupan organisme air (APRILIA, 2022).

2. Pencemaran udara

Gas dan partikel dapat menjadi pencemar udara. Sebagai contoh, gas H₂S (gas beracun) terdapat di kawasan gunung berapi dan bersifat racun. CO (karbon monoksida) dan CO₂ (karbon dioksida) adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang berasal dari pembakaran yang tidak sempurna dari mesin bermotor dan dapat mengikat panas matahari, menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, pemanasan global disebabkan oleh CO₂ dikenal sebagai efek rumah kaca (Suarti et al., 2014).

3. Pencemaran tanah Polutan Pencemar Tanah

- a. Limbah domestik
- b. Limbah industri
- c. Limbah pertanian (Saputra & Lubis, 2023).

Berdasarkan sifatnya polutan dibagi menjadi:

- a. Polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam (*biodegradable*) Contoh kayu, kertas, sisa makanan, sampah dedaunan.
- b. Polutan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alam (*nonbiodegradable*), Contoh gelas, plastik, pestisida, residu radioaktif, logam toksik.

Usaha Pencegahan:

- a. Menerapkan prinsip 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*).
- b. Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan industri terutama yang mengandung zat kimia.
- c. Melakukan bioremediasi (proses pembersihan menggunakan mikroorganisme (Mardianti et al., 2020).

2.4 Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis (Faizah et al., 2022).

Limbah adalah buangan atau material sisa yang dianggap tidak memiliki nilai yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pada dasarnya berbagai jenis limbah dihasilkan oleh kegiatan

manusia, baik itu kegiatan industri maupun domestik (rumah tangga) dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga bagi kesehatan manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi limbah adalah semua material sisa atau buangan yang berasal dari proses teknologi maupun dari proses alam dimana kehadirannya tidak bermanfaat bagi lingkungan dan tidak memiliki nilai ekonomis (Chairunnisa, 2022).

Limbah adalah bahan atau zat yang sudah tidak digunakan lagi setelah proses kegiatan manusia. Lingkungan mempunyai batas toleransi, apabila limbah sudah melebihi ambang batas toleransinya, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu (Suryani et al., 2019).

Limbah atau sampah juga merupakan bahan yang tidak berguna dan tidak berguna yang biasanya dibuang oleh orang-orang. Namun, kita tidak menyadari bahwa jika diolah dengan benar, limbah juga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat (Rusda et al., 2015).

Adapun sumber limbah rumah tangga Menurut Hasibuan sebagai berikut:

1. Limbah Organik, berdasarkan pengertian secara kimiawi limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur Karbon (C), sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia seperti tinja (*feaces*) berfungsi mengandung mikroba potogen, air seni (*urine*) umumnya mengandung Nitrogen dan Posfor sisa makanan (sisa-sisa sayuran, wortel, kol, bayam, salada dan lain-lain) kertas, kardus, karton, air cucian, minyak goreng bekas dan lain-lain.

2. Limbah Anorganik, berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca dan pupuk anorganik (misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor). Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat diurai oleh mikro organisme. Seperti halnya limbah organik, pengertian limbah organik yang sering diterapkan di lapangan umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah) agak sedikit berbeda dengan pengertian di atas secara teknis limbah anorganik di definisikan sebagai limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikro organisme pengurai (Hasibuan, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

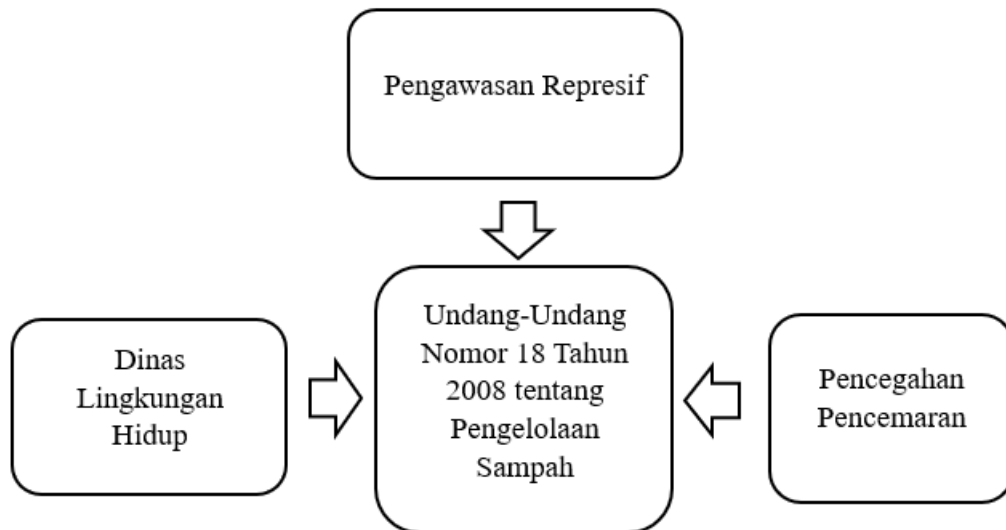
Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks yang dapat dikomunikasikan dengan kata-kata, melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan dilakukan dalam lingkungan alamiah (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Wowor, 2019).

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat (Rachmawati, 2007).

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fenomena atau fakta baru (Wardoyo et al., 2023).



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah sebuah pemikiran seseorang atas kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi, berfikir abstrak yang digunakan secara khusus terhadap konsep (Nurwahyu, 2017).

Berdasarkan teori tersebut, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaannya. Maksudnya ialah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana.

2. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 6 terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup merupakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, penanggulangan pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4. Pencegahan Pencemaran adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial (Al Adawiah, 2015). Pencegahan pencemaran juga harus ditingkatkan dalam permasalahan sampah ini dikarenakan dengan adanya pencegahan, setidaknya bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi biaya pengelolaan sampah (Nursan & Kahar, 2019).

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui (Setiawan et al., 2016).

Kategorisasi penelitian menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari penelitian tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang
- b. Adanya Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang

- c. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Faktor Penghambat

3.5 Informan dan Narasumber

Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021).

Narasumber adalah seorang yang berperan dalam pengambilan data yang akan digali dan menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup (Said et al., 2020).

Adapun Narasumber dan Informan yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah:

1. Nama : Susanto
Usia : 45 Tahun
Jabatan : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
2. Nama : Jenifana Sembiring
Usia : 30 Tahun
Jabatan : Seksi Pengurangan Sampah
3. Nama : Iwan Setiawan
Usia : 55 Tahun
Jabatan : Petugas Kebersihan
4. Nama : Raka
Usia : 25 Tahun
Jabatan : Petugas Kebersihan

5. Nama : Suwito
Usia : 58 Tahun
Jabatan : Masyarakat
6. Nama : Rika
Usia : 25 Tahun
Jabatan : Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah fase terpenting dari penelitian. Ini adalah proses pembelian data untuk keperluan penelitian, jadi tidak mungkin peneliti menghasilkan temuan tanpa data.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Antara lain; angket, wawancara atau interviu, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi dsb. instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Firdaus, 2010). Dalam penelitian ini yang diambil hanya wawancara dan pengamatan, dengan diadakannya wawancara dan pengamatan mengenai masalah sampah maka penelitian ini dapat terselesaikan.

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : “Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Mutiara Ayu Banjarsari, H. Irwan Budiman, 2015).

Untuk mengumpulkan data dan informasi dari narasumber, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Data Primer

Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data yang dilakukan secara pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara ditunjukkan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan.

b) Data Sekunder

Melalui studi keputusan peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diperoleh dari referensi beberapa buku, jurnal serta naskah lainnya. Data yang diperoleh menggunakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Luthfiyah, 2017).

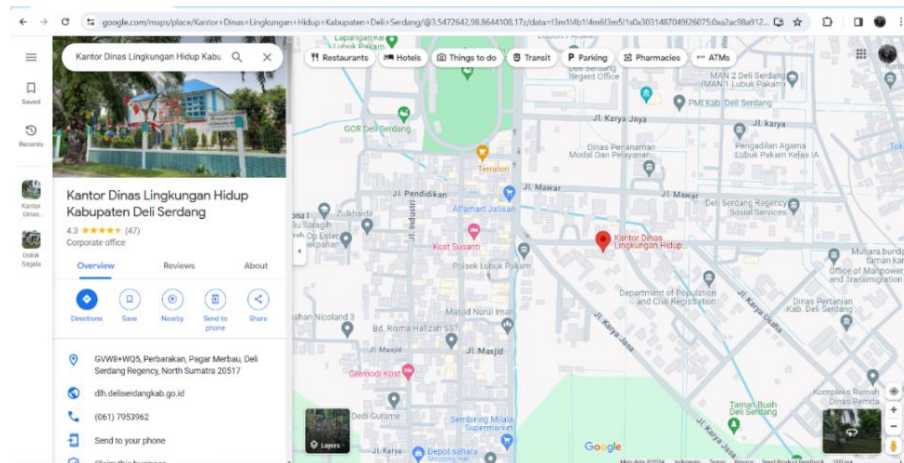
Teknik analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan

bertumpuktumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah (Suharsimi Arikunto, 2002).

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1 Lokasi Penelitian

Suatu penelitian sudah memiliki objek, agar penelitian dapat terlaksana. Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Sesuai dengan hal tersebut, maka menetapkan objek pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang di Jl. Karya Utama No. 1, Kec. Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara 20127.



Gambar 3.2 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup
Sumber: https://www.google.com/search?sca_esv=1ba

3.8.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2024					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengajuan Judul						
2	Acc Judul						
3	Observasi Awal						

4	Pengajuan Proposal						
5	Sempro						
6	Penulisan Skripsi						
7	Bimbingan Skripsi						
8	Sidang Meja Hijau						

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, yang berlokasi di Jl. Karya Utama No. 1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan bagian penting dalam tugas Bupati terkait lingkungan hidup. Struktur organisasi dinas ini meliputi berbagai bidang seperti Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Kabupaten Deli Serdang memiliki tipologi wilayah perbukitan, dataran rendah, dan pesisir pantai. Salah satu upaya penanggulangan sampah di kabupaten ini adalah melalui program Bank Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kabupaten Deli Serdang menghasilkan timbunan sampah sekitar 1.078 ton/hari dengan jumlah penduduk sekitar 2.155.625 jiwa.

3.9.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang

“Terwujudnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Yang Proaktif Dan Berperan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkelanjutan”

Adapun perumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Proaktif “memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti bahwa Badan Lingkungan Hidup akan lebih aktif dan responsif dalam

menjawab kondisi, tantangan, dan permasalahan lingkungan hidup aktual;

2. “Berperan “, bahwa Badan Lingkungan Hidup akan bertindak dan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dalam mengawal pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. “Pembangunan Berkelanjutan” adalah Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

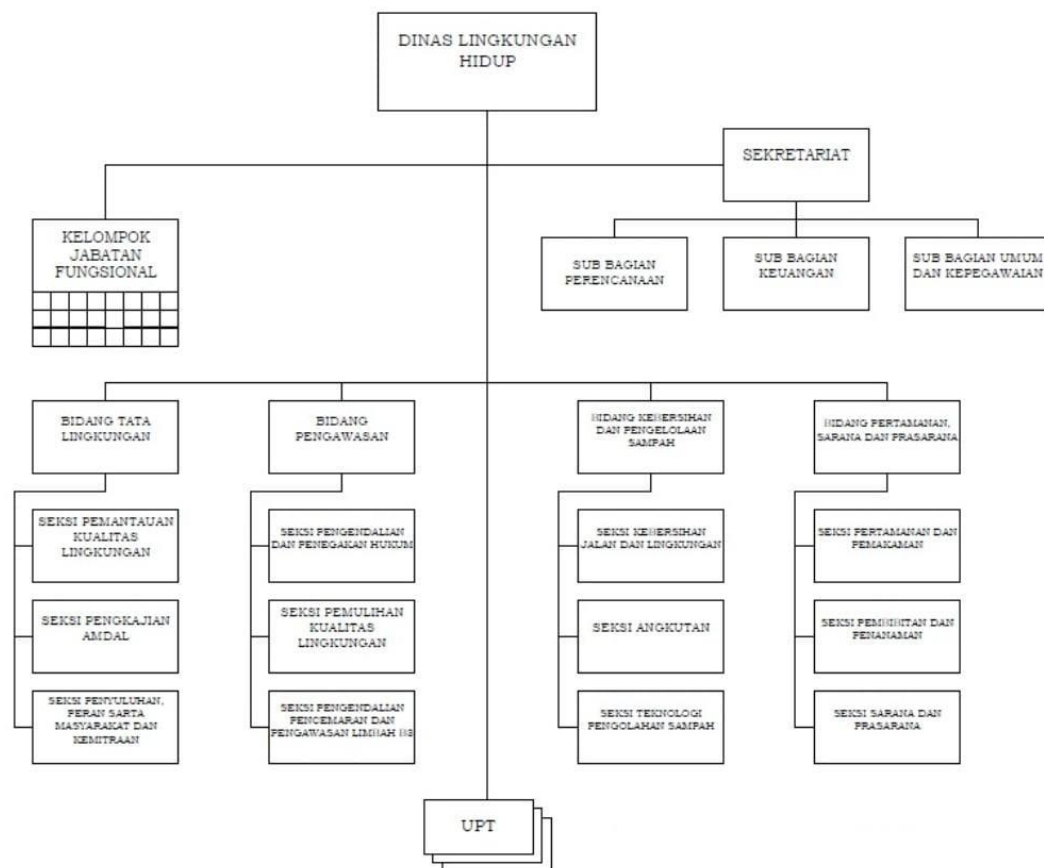
3.9.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang

Adapun Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program-program pengelolaan lingkungan.

4. Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.

3.9.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3.3 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data saat wawancara dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dan diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu memperoleh data dengan wawancara langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini berfokus pada lokasi penelitian dengan narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Petugas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang, dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarakan objek penelitian yang berkaitan dengan teori yang dipakai. Narasumber adalah seorang yang berperan dalam pengambilan data yang akan digali dan menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup (Said et al., 2020). Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Ibu Jenifana Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Bapak Iwan Setiawan selaku Petugas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang, dan Bapak Suwito selaku masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber dan informan untuk mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

a. Adanya Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang

Pengawasan dapat diartikan sebagai upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terhadap masyarakat untuk mencegah dan menghentikan perilaku yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam konteks pencegahan pencemaran sampah, pengawasan represif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan sampah, serta pengawasan terhadap kegiatan industri yang dapat menghasilkan limbah.

Agar dapat mengetahui Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang penulis menggunakan Teori T. Hani Handoko (Handoko, 2012) yaitu mengemukakan bahwa ada lima tahap dalam proses pengawasan yaitu Tahapan

Penetapan Standar, Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

1. Tahap Penetapan Standar

Proses pengawasan diawali dengan tahap penetapan standar kinerja. Estándar mengacu pada suatu pengukuran yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memvisualisasikan dan menganalisis hasil akhir suatu kegiatan. Tujuan, target, kuota dan target kinerja digunakan sebagai langkah dalam pengembangan standar.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dengan menentukan tujuan pengawasan pengelolaan sampah untuk mencegah terjadinya pencemaran yaitu untuk memperkuat kegiatan pengawasan pengelola sampah dan memantau efektifitas kegiatan pengelola dalam melaksanakan pengelolaan sampah sehingga dapat meminimalisir timbulan sampah di Kabupaten Deli Serdang dan bertujuan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sampah dengan baik. lingkungan masyarakat bersih, sehat dan tenteram. Tujuan merupakan indikator penting untuk mengetahui tercapainya cita-cita yang teridentifikasi dalam suatu program kerja”.

“Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, tim pengelola sampah bertujuan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan sampah yang sering dikeluhkan akibat banyaknya tumpukan sampah yang tidak sedap dipandang di jalan. Tujuannya juga bertujuan untuk membantu pengelola sampah lebih meningkatkan efektifitas upaya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang.”.

Kuota merupakan jumlah orang yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan pengawasan. Penentuan tenaga kerja ditentukan berdasarkan kualifikasi profesional dari mereka yang melakukan kegiatan pengawasan di bidang tersebut.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Juga mengatakan bahwa Ada 2 Personil ASN dan 15 personil honorer Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan pengawasan”.

Saat turun ke lapangan, kuota dan jumlah orang yang melakukan pemantauan didasarkan pada situasi dan kondisi sebenarnya dengan membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan pengelolaan sampah karena ini merupakan fungsi dari Peraturan Daerah Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Target yang ingin dicapai oleh pihak OPD sejalan dengan visi Dinas Lingkungan Hidup yakni “Berperan “, bahwa Badan Lingkungan Hidup akan bertindak dan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dalam mengawal pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam target pelaksanaannya penulis mengamati bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup membuat target pelaksanaan untuk membuat lingkungan yang bersih terhindar dari permasalahan sampah serta peningkatan terhadap kinerja pengelolaan sampah di bidang lingkungan hidup.

2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penerapan standar tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan cara mengukur kinerja sebenarnya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya dalam proses pengawasan adalah mengidentifikasi ukuran-ukuran yang mengukur kinerja. Jenis pengukuran dan pemangku kepentingan merupakan poin kunci yang menentukan penerapan standar kinerja.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Mengatakan bahwa Intensitas pelaksanaan merupakan ukuran untuk menentukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup berupa jadwal pelaksanaan (*time Schedule*) yang digunakan sebagai alat ukur agar keseluruhan kegiatan terjadi sesuai rencana. Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil keputusan terkait pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran. Hal ini dilakukan melalui penerapan lapangan secara intensif oleh bagian pengawas setiap hari untuk melihat apakah ada permasalahan yang timbul pada sisi pengelolaan sampah dalam menjalankan fungsinya”.

Bentuk pengukuran pada tahap penentuan metrik kinerja berupa laporan tertulis dan lisan melalui perangkat komunikasi. Bentuk pelaporan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, karena dalam melaksanakan kegiatan harus ada laporan sebagai bukti kegiatan. Bentuk pengukuran dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah observasi visual oleh tim pengawasan, guna melihat tingkat pengawasan yang optimal dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga. Jika sejalan dengan visi maka pelaksanaan pemantauan sudah optimal namun permasalahan yang muncul sehari-hari disebabkan oleh beberapa faktor.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Menjelaskan juga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat serta pihak pengelola sampah untuk melaporkan serta memberikan informasi terkait kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan dikarenakan objek yang diawasi merupakan permasalahan tumpukan sampah dan kinerja dari pihak pengelola sampah untuk mengatasi permasalahan tersebut”.

Dari pernyataan informan terkait 2 indikator pengawasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dimana hal

tersebut memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk pencegahan pencemaran. Pada tahapan ini penetapan standar tidak akan berguna jika tidak menyertakan cara pengukuran pelaksanaan kegiatan yang jelas, sehingga indikator ini sangat berguna dalam penentuan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan.

3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan berulang. Selama fase pengukuran, metode yang digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas, termasuk observasi, pelaporan, dan proses otomatis, digunakan dalam fase pengukuran kinerja aktivitas. Mengamati atau observasi adalah mengamati objek sebagai dokumen untuk langkah selanjutnya. Observasi pada tahap pengukuran kinerja kegiatan merupakan faktor terpenting untuk mengetahui detail kejadian sebenarnya di lapangan.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Jenifana Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengamatan di lapangan dengan melihat secara langsung keadaan yang terjadi di beberapa area rawan sampah serta area kerja dari pihak pengelola sampah di Kabupaten Deli Serdang. Setelah pengamatan dilakukan selanjutnya pengamatan tersebut dijadikan bahan evaluasi sekaligus koreksi yang kemudian dicari pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang”.

Penulis mengamati bahwa dalam melakukan pengamatan terhadap pihak pengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup terjun langsung dalam melakukan pengawasan sehingga dari hal tersebut langsung dapat di identifikasikan masalah kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan pemecahan masalah.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Jenifana Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Mengatakan bahwa Laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dijadikan sebagai bahan koreksi atau evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang berupa laporan lisan dan melalui media. Dari laporan-laporan yang disampaikan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang”.

Metode ini secara otomatis melakukan pengukuran menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Cara-cara tersebut digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah untuk mencegah terjadinya pencemaran. Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, juga menerapkan pendekatan sosialisasi dan menggali informasi terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat menjadi tugas tim pengawas Pengelolaan Sampah Lingkungan, namun juga melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi permasalahan sampah yang timbul di wilayah Deli Serdang.

Dari pernyataan informan terkait 3 indikator teori pengawasan T. Hani Handoko (Handoko, 2012) serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan berpengaruh penting terhadap kelancaran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar mempermudah dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah sudah berjalan sesuai dengan program atau tidak.

4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Dalam proses pengawasan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata terhadap pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan merupakan unsur penting dalam suatu kegiatan. Dalam tahapan ini tingkat kesukaran dapat terjadi pada saat menafsirkan adanya suatu penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisis untuk penentuan terhadap standar yang dicapai dan tidak dapat dicapai.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Jenifana Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, mengatakan bahwa Perbandingan pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditentukan menjadi unsur yang tidak kalah penting, dikarenakan pada tahapan ini adakalanya terdapat penyimpangan yang dapat terjadi antara pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditentukan. Adanya perbandingan bertujuan untuk menganalisis letak suatu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Standar yang telah ditentukan sebelumnya terhadap pelaksanaan nyata berkesesuaian sehingga dalam melaksanakan pengawasan seirama dengan target yang hendak dicapai”.

Selanjutnya penyimpangan yang terjadi diakibatkan oleh oknum masyarakat yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga oknum dari pihak pengelola sampah yang terkadang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Jika hasil analisis mempertunjukkan perlu adanya suatu tindakan koreksi maka tindakan harus segera dilakukan. Tindakan koreksi diambil dalam bentuk standar yang mungkin akan diubah, pelaksanaan kegiatan perbaikan, atau dilakukan secara serentak.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Mengatakan bahwa mengubah standar sangat diperlukan jika dianggap perlu dilakukan atau terdapat suatu koreksi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga diharapkan dengan adanya perubahan standar dapat

menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang tidak mengubah standar dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk pencegahan pencemaran akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pihak pengelola sampah dan juga peningkatan terhadap pengelola sampah yang melaksanakan tugas dalam mengelola sampah”

Langkah penyesuaian selanjutnya adalah dengan memodifikasi langkah-langkah pelaksanaan. Karena pelaksanaan belum sesuai dengan yang diharapkan, maka perubahan pelaksanaan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak perlu mengubah standar namun mengoptimalkan pengawasan terhadap hal-hal yang menyebabkan permasalahan sampah di Kabupaten Deli Serdang muncul ke media.

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Jenifana Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, mengatakan bahwa Mengubah cara analisis dan interpretasi penyimpangan yang sering terjadi dapat dijadikan solusi untuk mengatasi penyimpangan sehingga harapan yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan. Kami Dinas Lingkungan Hidup, tidak mengubah cara kami menganalisis dan menjelaskan penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi pengendalian kami dalam melaksanakan pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran. Langkah mengambil tindakan korektif, yaitu mengubah cara analisis dan penafsiran penyimpangan merupakan langkah penting jika diperlukan koreksi. Namun hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan fungsi pemantauannya sesuai dengan harapan, sehingga perubahan analisis atau interpretasi penyimpangan sejalan dengan standar operasional yang berlaku saat ini”.

Dari pernyataan informan terkait 5 indikator teori pengawasan T. Hani Handoko (Handoko, 2012) serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Analisa terhadap masalah yang ada kemudian mengambil

tindakan koreksi sesuai Teori T. Hani Handoko hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan dan diharapkan akan berpengaruh terhadap pemecahan permasalahan pengelolaan sampah.

b. Adanya Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, beliau juga mengatakan ada beberapa faktor penghambat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk pencegahan pencemaran yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan karena sumber sampah berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sekuat apapun usaha serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak dibarengi dengan upaya masyarakat untuk menjaga lingkungan maka proses pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak akan pernah berhasil untuk diminimalisir karena masyarakat sendiri yang terkadang membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya Sumber Daya Anggaran dalam proses pengawasan Untuk melakukan proses pengawasan dibutuhkan anggaran yang cukup. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih terkendala dalam hal

penganggaran yang dimana anggaran yang diperlukan guna melakukan pengawasan terhadap beberapa area titik sampah di beberapa kecamatan yang luas, anggarannya cukup besar, terkhusus berkaitan dengan operasional kendaraan, pangan, tim, dan estimasi proses pengawasan ketika berada di lapangan.

3. Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Kurang Memadai Keberadaan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai tentunya dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik. Akan tetapi, untuk lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Deli Serdang hanya ada satu sehingga membuat tumpukan sampah di beberapa titik meningkat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut menampung keseluruhan sampah di Kabupaten Deli Serdang dan dilatarbelakangi oleh jumlah operasional yang ada beberapa yang rusak dan baik sehingga untuk mengelola sampah membutuhkan waktu yang lebih lama, hal ini dapat dilihat dari data jumlah sarana dan prasarana yang sedikit dan ada beberapa keadaannya buruk yang dimana mengingat banyaknya titik area rawan sampah sehingga dalam melaksanakan pengawasan serta pengelolaan sampah menjadi terhambat dan tidak maksimal. Mengatasi sampah residu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan diantaranya pilih produk dengan kemasan minimal atau kemasan yang dapat didaur ulang dan Pemilahan sampah yang akan memudahkan proses pengolahan dan mengurangi volume sampah residu yang perlu ditangani (Abedin, 2024).

c. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk pencegahan pencemaran ada berbagai faktor penghambat yang dihadapi. Hal ini membutuhkan upaya guna mengatasi penghambat tersebut dan untuk mengoptimalkan outputnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 29 April 2024, Beliau menjelaskan terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi faktor penghambat fungsi pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah untuk pencegahan pencemaran di Kabupaten Deli Serdang. Upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. melalui sosialisasi dan pembinaan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta efek buruk yang ditimbulkan dari tumpukan sampah yang tidak terkelola sehingga dapat meminimalisir produksi sampah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kampanye kesadaran yang dilakukan melalui media, organisasi lingkungan, dan event-event dapat

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kampanye ini dapat berisi informasi tentang isu-isu lingkungan, cara-cara menjaga lingkungan, serta implikasi negatif dari tidak menjaga lingkungan (Nyakyi et al., 2024).

2. Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Guna mendukung kelancaran dan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas bidang pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup terus membenahi segala macam kekurangan kearah yang lebih baik. Salah satunya yakni penambahan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Sarana dan prasarana yang memadai akan sangat berguna dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan serta pergerakan anggota tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di beberapa lokasi akan semakin efektif dan efisien (Wootton et al., 2024). Hal tersebut dilakukan guna mempercepat pencapaian tujuan yang sudah ditentukan yakni lingkungan yang bersih, sehat, dan tentram.
3. Menambah dan memperluas lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dapat menampung produksi sampah di Kabupaten Deli Serdang Dalam proses pengelolaan sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan unsur penting dalam proses tata Kelola sampah karena disinilah tempat pemrosesan akhir dari sampah yang dikelola. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melakukan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang digunakan untuk proses akhir

pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang dikarenakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Deli Serdang hanya satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampung keseluruhan produksi sampah di beberapa kecamatan sehingga guna meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah dan meminimalisir permasalahan sampah maka dilakukan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampung produksi sampah. Cara pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang baik adalah dengan menggunakan sistem pengelolaan yang berfokus pada keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sistem pengelolaan yang direkomendasikan adalah sistem *sanitary landfill*, yang melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penutupan sampah secara teratur dan berkelanjutan (Abhijith et al., 2024).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan hasil penelitian Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang.

Penulis menarik kesimpulan bahwa Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Faktor Penghambat dari Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Melalui sosialisasi dan pembinaan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan sampah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan
3. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih kurang.
4. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi faktor penghambat Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan

Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang yakni dengan, melakukan Sosialisasi dan pembinaan demi meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa bekerja sama untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka saran penulis adalah agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan penulis memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu:

1. Melakukan sosialisasi menyeluruh kepada lapisan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat menjaga lingkungan serta menjalankan program yang sudah dibuat pemerintah dalam upaya pengurangan sampah bagi masyarakat dan pihak lainnya, serah hal yang dapat dijadikan upaya dalam pengurangan sampah.
2. Peningkatan terhadap sumber daya manusia serta sumber daya anggaran guna kelancaran dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Tata Kelola Sampah yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
3. Melakukan penambahan dan perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam upaya peningkatan proses pengelolaan sampah serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional guna

melancarkan proses pengelolaan sampah mulai dari pengurangan hingga pemrosesan akhir agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya.

4. Melakukan pemberian sanksi bagi pihak pengelola sampah yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta memberikan penghargaan bagi pihak pengelola sampah yang melaksanakan tugas penuh tanggung jawab guna meningkatkan semangat motivasi dan mengoptimalkan proses kinerja dalam Tata Kelola Persampahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh. (2019). *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*.
- Abedin, M. Z. (2024). ur na. *Results in Surfaces and Interfaces*, 100221. <https://doi.org/10.1016/j.rsurfi.2024.100221>
- Abhijith, K. V., Kumar, P., Omidvarborna, H., Emygdio, A. P. M., McCallan, B., & Carpenter-Lomax, D. (2024). Improving air pollution awareness of the general public through citizen science approach. *Sustainable Horizons*, 10(November 2023), 100086. <https://doi.org/10.1016/j.horiz.2023.100086>
- Aedi, N. (2005). Pengawasan Pendidikan. *Pengawasan Manajemen*, 1–45.
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10(1), 61–69. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>
- APRILIA, T. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi* 1(2), 127–136. [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18512%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18512/SKRIPSI T. AFANIN SYIFA APRILIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18512%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18512/SKRIPSI%20T.%20AFANIN%20SYIFA%20APRILIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- ARTAMEVIAH, R. (2022). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Billah, M. (2019). *Bab Ii Tinjauan Pustaka Tentang Pengawasan, Dan Perencanaan Pembangunan*. 30. [http://repository.unpas.ac.id/46395/1/J.BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/46395/1/J.BAB%20II.pdf)
- Chairunnisa. (2022). *Gambaran Penanganan Limbah Padat Pada Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang*. 3(1), 11–21.
- Desiana, A. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 176.
- Edy Susanto, M. (2019). Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faizah, M., Rizky, A., Zamroni, A., & Khasan, U. (2022). Pembuatan Briket sebagai Salah Satu Upaya Pemanfaatan Limbah Pertanian Bonggol Jagung di

- Desa Tampingmojo. *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 65–68. <https://doi.org/10.32764/abdimasper.v3i2.2863>
- Firdaus, M. (2010). Instrumen Penelitian. *Metodelogi Penelitian*, 15–20.
- Handoko, T. H. (2012). Pengantar Manajemen Karangan T. Hani Handoko Bab 2. *Faizal Nuzul Razak Hamid*, 1(1), 30.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 04(01), 42–52. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+issn+rosmidah+hasibuan>
- Hasriana, N. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Religius Dan Implikasinya Terhadap Karakter Murid Di Sdn 117 Inpres Kurusumange Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 11–39.
- Hazrullah. (2021). Konsep Pengawasan Dalam Pendidikan Islam. *Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry*, 10(1), 39–52.
- Ii, B. A. B., & Lingkungan, D. P. (2014). *Kl Ok*. 6–15.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2002). *BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1*. 1–64.
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Leonade. (2019). Fungsi Pengorganisasian. *Studi Manajemen, Organisasi*. <https://www.studimanajemen.com/2019/03/fungsi-pengorganisasian-manajemen-organisasi.html>
- Luthfiyah, M. F. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. November, 26.
- Maiti, & Bidinger. (2017). Pengawasan Sumber Daya Manusia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 13–32.
- Mardianti, I., Kasmantoni, K., & Walid, A. (2020). Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Berbasis Etnosains Materi Pencemaran Lingkungan Untuk Melatih Literasi Sains Siswa Kelas VII di SMP. *Bio-Edu: Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 98–107. <https://doi.org/10.32938/jbe.v5i2.545>
- Marniati, Prof.Adjunct, D. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2.
- Meriza, I. (2018). Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 37–46.
- Mutiara Ayu Banjarsari, H. Irwan Budiman, A. F. (2015). Penerapan K-Optimal Pada Algoritma Knn Untuk Prediksi Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Fmipa Unlam Berdasarkan Ip Sampai Dengan

- Semester 4. *Klik - Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer*, 2(2), 159–173.
<https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=262116>
- Nurdiansyah, F., & Rugoyah, H. S. (2021). Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(2), 159.
- Nursan, & Kahar, F. (2019). Birokrat: jurnal ilmu administrasi publik issn : 2354-5925. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 116–130.
- Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd). *Accountability*, 2(1), 140.
<https://doi.org/10.32400/ja.2351.2.1.2013.140-150>
- Nurwahyu, B. (2017). Suatu Gambaran Bayangan Konsep Dan Definisi Konsep Turunan. *KnM*, 1(July 2012), 2–9.
- Nyakyi, C. P., Mpeshe, S. C., & Dida, M. A. (2024). Assessment of public awareness on the effects of exposure to non-ionizing radiation sources in Tanzania. *Journal of Radiation Research and Applied Sciences*, 17(1), 100770. <https://doi.org/10.1016/j.jrras.2023.100770>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
<https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, III(01), 46–56. <https://adoc.pub/strategi-pembangunan-berkelanjutan-ah-rahadian-institut-ilmu.html>
- Riswan, Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2015). Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), 31–39.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085>
- Rusda, I. S., Purwoko, P., & H, N. R. (2015). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan Pada Tahun 2010-2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 21–30.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/9152/8890>
- Said, F., Andriyanto, D., Sari, R., & Gata, W. (2020). Perancangan Validasi Permohonan Narasumber Pada Sistem Informasi Permohonan Narasumber Menggunakan Finite State Automata. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 22(2), 189–196. <https://doi.org/10.31294/p.v22i2.8157>
- Saputra, A., & Lubis, F. H. (2023). *Pengembangan Diri Kepemimpinan Remaja dan Keterampilan Komunikasi di Kampung Sejahtera Kota Medan Pendahuluan*. 8. <https://doi.org/10.30596/jp.v>
- Sari, J. A., Ismowati, M., Nur Sukmawati, & Nur Ambia Arma. (2022).

- Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 127–136. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7886>
- Setiawan, A., Astuti, I. F., & Kridalaksana, A. H. (2016). Klasifikasi Dan Pencarian Buku Referensi Akademik Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier (NBC) (Studi Kasus: Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur). *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30872/jim.v10i1.17>
- Sigar, J. A. B., Sambul, S. A. P., & Jurusan, S. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Hotel Sintesa Peninsula Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol.6 No 3(3), 52–60.
- Siregar, E. S., & Nasution, M. W. (2020). Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: (Studi Kasus di Kota Pejuang, Kotanopan). *Jurnal Education and Development*, 8(9), 589–593.
- Sofianto, S. (2024). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Masyarakat di Kota Tanjungpinang*. 2(1).
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6–13. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>
- Suarti, B., Taufik, & Saputra, A. (2014). Pengawetan Susu Kedelai dengan Penambahan Nipagin Selama Penyimpanan. *Jurnal Agrium*, 18(3), 193–202.
- Suharsimi Arikunto. (2002). Metodologi Penelitian. *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 107.
- Suryani, L., Aje, A. U., & Tute, K. j. (2019). Pkm Pelatihan Kelompok Anak Cinta Lingkungan Kabupaten Ende Dalam Pegelolaan Limbah Organik Dan Anorganik Berbasis 3R Untuk Mengeskalasi Nilai Ekonomis Barang Sebagai Bekal Wirausaha Mandiri. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 244–251. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.3679>
- Syafwandi, S., & Umar, A. (2022). Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyatdaerah (DPRD) Kabupaten *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14730–14745. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4755%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4755/4028>
- Tri Sakti, F., & Nabila Fauzia, S. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 164.
- Umar, H. (2015). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi Inspektorakt Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. *Jurnal Akuntansi &*

Auditing, 8(2), 95–189.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/issue/view/997>

- Wahyu Baskoro. (2018). BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Wardoyo, D. U., Sinaga, S. T., & Mawarni, A. (2023). Kerangka Konseptual dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(4), 803–809.
- Wootton, N., Nursey-Bray, M., Holland, S., & Gillanders, B. M. (2024). Better understanding ocean awareness: Insights from young people. *Marine Policy*, 164(March), 106159. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106159>
- Wowor, M. (2019). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, (3)(3), 1–11.
- Yuliesti, K. D., Suripin, S., & Sudarno, S. (2020). Strategi Pengembangan Pengelolaan Rantai Pasok Dalam Pengelolaan Sampah Plastik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 126–132. <https://doi.org/10.14710/jil.18.1.126-132>
- Zai, B. I., Waruwu, E., Telaumbanua, E., Pengawasan, P., Terhadap, I., Pegawai, K., Dinas, P., Zai, B. I., Waruwu, E., & Telaumbanua, E. (2022). *THE EFFECT OF INTERNAL SUPERVISION ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE Jurnal EMBA Vol . 10 No . 4 Oktober 2022 , Hal . 1209-1224.* 10(4), 1209–1224.

DOKUMENTASI

Foto Bersama Ibu Saur Mangasi Pangaribuan S.E, M.Si Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan Bapak Indra Soangkupon S. Selaku Kepala Bidang Penataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Penulis, Fahriza Havis (Hasil penelitian diambil pada Rabu , 24 April 2024)

Foto Bersama Dengan Bapak Susanto Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Penulis, Fahriza Havis (Hasil penelitian diambil pada Senin, 22 April 2024)

Foto Bersama Dengan Ibu Jenifana Sembiring Selaku Seksi Pengurangan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Penulis, Fahriza Havis (Hasil penelitian diambil pada Senin, 22 April 2024)

Poto Bersama Bapak Iwan Setiawan Selaku Petugas Kebersihan Kabupaten Deli
Serdang



Sumber: Penulis, Fahriza Havis (Hasil penelitian diambil pada Senin, 22 April 2024)

Poto Bersama Bapak Suwito dan Ibu Rika Selaku Masyarakat Kabupaten Deli
Serdang



Sumber: Penulis, Fahriza Havis (Hasil penelitian diambil pada Selasa, 23 April 2024)

Poto Bersama Bapak Supiah, S.Sos Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Penulis, Fahriza Havis (Hasil penelitian diambil pada Rabu, 27 Maret 2024)

Draft Wawancara

 15/3 2024.
Aze Prof Wlwea

Judul Penelitian : FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH
BERBAHAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG

Nama Peneliti : Fahriza Havis

NPM : 2003100019

Mahasiswa : Ilmu Administrasi Publik FISIP-UMSU/Medan

Hari/Tanggal :

A. Identitas Responden:

1. Nama:
2. Usia:
3. Jabatan:

B. Draft Wawancara:

B.1 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang

1. Bagaimana Definisi pengawasan pencegahan pencemaran sampah menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang?
2. Bisa jelaskan metode saja apa yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terhadap pengawasan pencemaran sampah?
3. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam mengawasi pencemaran sampah?
4. Bagaimana Tindakan (*Action*) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengatasi hambatan tersebut?
5. Apakah ada perbandingan (*compare*) terkait pencegahan pencemaran sampah dari hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan?

6. Upaya apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum?
7. Siapa yang melakukan pengawasan pencegahan pencemaran sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang?
8. Berapakah jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan?
9. Apakah jumlah pegawai pada bidang pengawasan sudah memadai?
10. Bagaimana dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang berkolaborasi dengan pihak lain, seperti industri, komunitas atau masyarakat dalam upaya pengawasan?
11. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terlibat dalam program edukasi dan kesadaran masyarakat terkait pengawasan pencemaran sampah?
12. Apa rencana atau proyek masa depan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terkait pengawasan pencemaran sampah?
13. Apakah ada pesan atau informasi penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pengawasan pencemaran sampah?

B.2 Petugas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang

1. Bisakah Anda menjelaskan tugas dan tanggung jawab khusus yang Anda miliki sebagai petugas kebersihan di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah ada wilayah tertentu yang menjadi fokus pengawasan pencemaran sampah?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi petugas kebersihan terhadap pengawasan pencemaran sampah di Kabupaten Deli Serdang?
4. Apa harapan anda untuk masa depan terhadap pengawasan pencemaran sampah di Kabupaten Deli Serdang?

5. Apakah ada pesan khusus atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang terkait menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran sampah?

B.3 Masyarakat Kabupaten Deli Serdang

1. Bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat masyarakat sulit untuk menjaga kebersihan lingkungan?
3. Bagaimana masyarakat Kabupaten Deli Serdang diberdayakan melalui program edukasi dan kesadaran terkait pencemaran sampah?
4. Apakah Anda atau masyarakat lokal pernah terlibat dalam program pembersihan atau kegiatan serupa untuk menjaga kebersihan lingkungan?
5. Apakah Anda merasa bahwa masyarakat mendukung kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait pengawasan pencemaran sampah?
6. Apakah ada pesan khusus untuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait upaya pengawasan pencemaran sampah?
7. Apakah ada pesan khusus untuk masyarakat sekitar Anda terkait menjaga kebersihan lingkungan?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di sini kami hadir untuk agar mahasiswa nomor satu langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/Ak.KP/PT/01/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622403 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umu.ac.id | fkip@umu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

SK-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 15 Januari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Fahriza Havis
NPM : 2003100019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 133 SKS, IP Kumulatif : 3,59

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi pengawasan Represip Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan pencemaran Limbah Berbahaya Di Kabupaten Deli Serdang	15/1/2024 Acc
2	Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Kacang Asin Di Kecamatan Tanjung Morawa	
3	Efektifitas Kinerja Kepala Desa Terhadap Program KETAPANG "Ketersahan pangan Di Desa Batu Lintang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 15 Januari 2024

Ketua
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Manandana, S.Sos, M.S.P)
NIDN: 0122110001

27

Pemohon,

(Fahriza Havis)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(Agung Saputra, S.Sos, M.AP)
NIDN: 020010303

Dr. Agung Saputra, S.Sos. M. AP





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menyebarkan surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 162/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 15 Januari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **FAHRIZA HAVIS**
N P M : 2003100019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA
DI KABUPATEN DELI SERDANG**
Pembimbing : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 027.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 07 Rajab 1445 H
19 Januari 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402




Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan lengkapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://filsp.umsu.ac.id> ✉ filsp@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 Februari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fahriza Havis
N P M : 2003100019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 162 /SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024. tanggal dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI BENGAYASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAMBAK DI KABUPATEN
DELI SERDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Riaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

Agung Saputra, S.Sos, M.AP

NIDN: 0120018303

Pemohon,

Fahriza Havis



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 431/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	FAHRIZA HAVIS	2003100019	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	DWI RACHMAYANI	2003100028	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN
3	NABILA SALSABILA	2003100010	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITINGGI
4	RATNA DEWI UTAMI	2003100011	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	STRATEGI PELAYANAN PRIMA DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KANTOR DINAS SOSIAL DELI SERDANG
5	PUTRI PERMATASARI	2003100034	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	FUNGSI DIRECTING CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM POS SIAGA STUNTING (POSTING) DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN

Medan, 24 Syaaban 1445 H
05 Maret 2024 M



STARS





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PTXII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 490/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 06 Ramadhan 1445 H
16 Maret 2024 M

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : FAHRIZA HAVIS
N P M : 2003100019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telepon. 061-7952964
e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070/305

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 490/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 16 Maret 2024 perihal permohonan izin Rekomendasi Penelitian oleh :
 - a. Nama : **Fahriza Havis**
 - b. Alamat : Dusun I Desa Naga Timbul Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1207021804020001
 - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 - f. Judul : Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya Di Kabupaten Deli Serdang
 - g. Daerah/lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang
 - h. Lama : 2 (dua) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 27 Maret 2024

An- **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**
Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

SUPIAH, S.Sos
Pembina
NIP. 19740108 199402 2 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang.
4. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis UMSU.
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
Telepon/Faksimile (061) – 7951422

Pos-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id Laman <https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 27 Maret 2024

Nomor : 000.9/ 2040/BAPPEDALITBANG/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/305 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 490/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal permohonan Izin Rekomendasi Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Fahriza Havis
- b. Alamat : Dusun I Desa Naga Timbul Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
- c. NIP / NIM / KTP : 1207021804020001
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Prodi / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
- f. Judul / Tema : Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang
- g. Daerah / Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang
- h. Lama : 2 (dua) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS**



SIGIT PRAMULIA, ST, M.Ec.Dev
PEMBINA
NIP. 19810301 200604 1 017

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
5. Peringgal



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Pusat Pendidikan dan Penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan @umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Fahrizz Havis
N P M : 2003100019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKAR BERBAHAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	25/01/2024	Revisi Latar Belakang Masalah, Uraian teoritis, Metode penelitian	
2.	5/02/2024	Revisi Latar Belakang Masalah, uraian teoritis, Metode penelitian	
3.	12/02/2024	Revisi uraian Teoritis	
4.	20/02/2024	ACC Seminar Proposal	
5.	30/04/2024	Revisi Bab 4 (Hasil Penelitian dan Pembahasan)	
6.	2/05/2024	Revisi Bab 4 (Hasil Penelitian dan Pembahasan)	
7.	6/05/2024	Revisi Bab 5 (Saran dan Kesimpulan)	
8.	8/05/2024	Revisi Daftar Pustaka	
9.	11/05/2024	Revisi Daftar Pustaka	
10.	13/05/2024	ACC Skripsi	



(Dr. H. H. S. S. S., S.Sos., MSP.)
NIDN : 0122118901

Ketua Program Studi,

(Fahrizz Maharuzka, S.Sos., M.P.)
NIDN : 0122118901

Medan, 13 Mei 2024

Pembimbing

(Agung Saputra, S.Sos., M.AP.)
NIDN : 0120010303





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor: 00691/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Fahriza Havis
NPM : 2003100019
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, *23 Syawal 1445 H*
02 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 689/KET/KESKAP/V/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fahriza Havis
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup
Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di
Kabupaten Deli Serdang
Jumlah Halaman : 12 Halaman
Penulis : Fahriza Havis, Agung Saputra

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Mei 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 810/UND/II.3.AU/UMSU-03/1F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
1	ERIC SELVIO	1903100008	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS ORGANIZING KELOMPOK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI DI DESA SEI REJO KECAMATAN SEI RAMPAH
2	FAHRIZA HAVIS	2003100019	IDA MARTINELLY, SH., MM	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
3	ANNISA PUTRI SETIAWAN	2003100015	IDA MARTINELLY, SH., MM	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING KELOMPOK PKK DALAM PROGRAM P2WKSS (PENINGKATAN PERANAN WANITA KELUARGA SEHAT SEJAHTERA) DI KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR
4	SASKIA ANZLIKA	2003100041	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHAH, S.Sos., M.Si	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DALAM MENGELOLA KELOMPOK TANI MILO CANNI SERASI DI DESA PUNGGULAN KECAMATAN AIR JOMAN
5	SITI NURKHOLIZAH	2003100004	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PARTISIPATIF TIM PAMSIMAS (PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH DI DESA BAKTI MAKMUR

Notulis Sidang :

1.

Tua - Frans
Ketua - Frans

Medan, 12 Dzulhaidjah 1445 H
20 Mei 2024 M

Ditandatangani oleh :
Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH, M.Hum
Rektor



Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Data Pribadi / Personal Details

Nama / *Name* : Fahriza Havis
Alamat / *Address* : Jl. Sei Merah Desa Naga Timbul Dusun I
Padang Bolak Tanjung Morawa
Kode Pos / *Postal Code* : 20362
Nomor Telepon / *Phone* : 0877-7493-1727
Email : fahrizahavis10@gmail.com
Jenis Kelamin / *Gender* : Laki-Laki
Tanggal Lahir / *Date of Birth* : 10 April 2002
Status Marital / *Marital Status* : Belum Menikah
Warga Negara / *Nationality* : Indonesia
Agama / *Religion* : Islam

Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

Educational and Professional Qualification

Periode			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang
2007	-	2008	TK SHERINA Galang	-	TK
2008	-	2014	SD 101980 Galang	-	SD
2014	-	2017	Mts Swasta YP. NURUL AMALIYAH Tanjung Morawa	-	SMP
2017	-	2020	MAN 1 DELI SERDANG	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	SMA
2020	-	2024	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)	Ilmu Administrasi Publik (IAP)	Strata-1 (S1)

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1. Webinar FISIP UMSU Bicara “Sinergitas Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Era *New Normal*” (2021)
2. Webinar “Indonesia Makin Cakap Digital Dengan Tema Literasi Digital” (2021)
3. Diskusi Publik “Eksistensi Gen-Z Dalam Perkembangan Medan *Smart City* Tahun 2030” (2022)
4. Seminar Kewirausahaan (2023)
5. Webinar “Upaya mengedukasi tentang pentingnya berorganisasi (2021)
6. Pelatihan Desain (2022)
7. Pelatihan *Photography* (2022)
8. Webinar “*Computer Science Sharing Session 1: Introduction to Augmented Reality*” (2021)
9. Webinar GeliFest II “Semarak Literasi Menuju Indonesia Maju di Era *Society 5.0*” (2022)
10. Webinar “*THE POWER OF COMMUNICATION SKILL*” (2023)
11. Webinar “Penguatan Profil Pelajar Pancasila” (2022)
12. Webinar “*The Biggest Event Public Speaking PEAK PERFORMANCE*” (2023)

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Fahriza Havis
2003100019